

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 104 TAHUN 2015 SERI E. 98

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 104 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 2015 / 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya akselerasi peningkatan produktivitas gula nasional dan pemberdayaan kelompok tani, Koperasi dan Pabrik Gula dibidang usaha agribisnis dan agroindustri khususnya untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja industri gula, maka perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2015/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2015/2016, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 / Permentan / SR/.120/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 / Permentan/ SR.120 / 1 / 2014 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran Benih Bina;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6 Seri D.1);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 58, Seri D.16).

- Memperhatikan :
1. Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 525/Kep.401- Rek/ 2015, tanggal 26 Maret 2015 tentang sasaran arel dan produksi tebu rakyat musim tanam Tahun 2015/2016.
 3. Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E);
 4. Pedoman Teknis Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Pertanian Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012;
 5. Hasil Rapat Koordinasi Program Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) Kabupaten Cirebon tanggal 15 Maret 2015 Musim Tanam Tahun 2015/2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2015/2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

4. Dinas adalah Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon; ✓
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon; ✓
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon; ✓
7. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait antara lain : Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan, PG berbasis tebu, DPC APTRI dan Instansi lain yang dianggap perlu; ✓
8. Pabrik Gula adalah Pabrik Gula yang ada di Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh PT. PG. Rajawali II; ✓
9. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disingkat program PTR adalah Program Usaha Tebu Rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan; ✓
10. Perusahaan Perkebunan adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri gula, baik yang bertindak sebagai perusahaan Pembina, Perusahaan pengelola dan perusahaan penghela milik Negara, yang melaksanakan PTR dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada serta memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai dengan anjuran;
11. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitas kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir, penumbuhan modal ekonomi dan penguatan kewirausahaan yang meliputi kegiatan pembangunan kebun bibit, pembongkaran ratoon, pengembangan tebu dilahan historis, rawat ratoon dan pengairan; ✓
12. Kelompok mitra adalah petani tebu, yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota koperasi, baik koperasi petani tebu ataupun Koperasi Unit Desa (KUD) yang melaksanakan Program Pengembangan Tebu Rakyat; ✓
13. Assosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disingkat APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu; ✓
14. Bank pelaksana adalah Bank Umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit Tebu Rakyat dalam Program KKPE; ✓

15. Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi selanjutnya disingkat KKP-E adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan program pengembangan tanaman bahan bakar nabati;
16. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disingkat TRS adalah PTR yang diselenggarakan di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara reynoso dan pola mekanisasi baik yang menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
17. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disingkat TRT adalah PTR yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
18. Teknologi anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi : penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman serta melaksanakan panen dan pasca panen secara efisien;
19. Koperasi Petani Tebu Rakyat adalah kelembagaan petani tebu yang bergerak di bidang usaha yang berbasis tebu;
20. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain - lain;
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDKK, yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau instansi lembaga pelayanan lain;

22. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disingkat FMPG adalah suatu forum musyawarah antara petani tebu, Pabrik Gula dan Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam kegiatan program tebu rakyat ditingkat Pabrik Gula;
23. Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah yang selanjutnya disingkat FMPW adalah suatu forum musyawarah antar petani dengan sinder kebun wilayah serta Dinas/Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan Tebu Rakyat ditingkat kebun.

BAB II

POKOK - POKOK KEBIJAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

1. Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) dilaksanakan di lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran petani Tebu Rakyat.
2. Semua petani tebu/penggarap yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program Pengembangan Tebu Rakyat, dengan mendapat bimbingan dari Pabrik Gula yang bersangkutan.
3. Pabrik Gula merupakan Perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

Pasal 3

1. Pelaksanaan pola kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula disesuaikan dengan kondisi di masing - masing daerah dan dapat berbentuk :
 - a. Tebu Kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani/kelompok tani dengan Pabrik Gula, yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit maupun tanpa fasilitas kredit;
 - b. Tebu Rakyat Mandiri yaitu PTR yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh Pabrik Gula.

2. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit dan kebun percontohan, Pabrik Gula diberi kewenangan untuk menyewa lahan dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan pedoman teknis pembangunan kebun benih dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

1. Tebu Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Adanya perjanjian kerjasama antara petani/Kelompok tani, Pabrik Gula dan Koperasi yang dibuat atas dasar hasil musyawarah;
 - b. Untuk kemitraan dan/ atau penggarapan kebun dan biaya lainnya dilaksanakan sendiri oleh petani dan/atau Pabrik Gula, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil dan adanya jaminan pendapatan minimal petani;
2. Pabrik Gula berkewajiban membina petani peserta tebu kemitraan untuk aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

Pasal 5

1. TRS terdiri atas Tanaman Pertama (TRS-I) dan Tanaman Kedua/Keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam yang ditetapkan oleh Bupati.
2. TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III) yang diatur secara rotasi dengan tanaman lain, dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan.

Pasal 6

1. Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/Lembaga terkait.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu pada setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program PTR, harus menyusun RDK dan RDKK.

3. Penyusunan RDK dan RDKK disesuaikan dengan sasaran areal dan dibimbing oleh UPT dan Pabrik Gula setempat.

Pasal 7

1. Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani yang berada dalam wilayah kerjanya dan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula pembimbing dengan sistem bagi hasil.
2. Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil yaitu Petani/Kelompok Tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebu berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar.
3. Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani juga memperoleh hasil dari tetes tebu.

BAB III LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Program PTR Musim Tanam Tahun 2015/2016 diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan /pemeliharaan tanaman pada setiap musim tanam tahun berjalan serta penyiapan kebun benih untuk penanaman tebu musim tanam berikutnya ;
- b. Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (Plant Cane) dan keprasan (Ratoon) pada musim tanam Tahun 2015/2016 yang akan dipanen Tahun 2016 baik dilahan sawah maupun di lahan tegalan/lahan kering serta penyelenggaraan tumpangsari di daerah yang memenuhi persyaratan teknis;
- c. Penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (Kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pabrik Gula dan Koperasi;

- d. Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil serta pemasaran gula hasil TR yang dipanen pada Musim Giling Tahun 2016 merupakan hasil tanaman TR yang ditanam pada Musim Tanam Tahun 2015/2016;
- e. Pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan serta cara pemecahan masalah pada berbagai tingkatan pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha tani tebu.

BAB IV
SASARAN
Pasal 9

1. Sasaran areal dan produksi musim tanam Tahun 2015/2016 sebagai berikut :

| No. | Jenis Lahan | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | | Rend (%) | Produksi Hablur (Ton) | |
|-----------|---------------|-----------------|----------------|--------|----------|-----------------------|--------|
| | | | Jumlah | Per Ha | | Jumlah | Per Ha |
| 1. | Sawah (TRS) | 6.122,23 | 434,056.95 | 70.90 | 7.26 | 31.493,14 | 5,41 |
| 2. | Tegalan (TRT) | 339,31 | 22.037,35 | 650,64 | 7.09 | 1.561.80 | 4,60 |
| 3. | TR.Mandiri | 980,00 | 76,800.00 | 750,00 | 6.85 | 5.263,50 | 5,37 |
| Jumlah TR | | 7.441.54 | 76.800,00 | 742,72 | 7,19 | 38.318,44 | 5,15 |

2. Rincian sasaran luas areal, program PTR per Pabrik Gula/ Kecamatan/ Desa/ Kebun/ Kategori Tanaman dan rincian sasaran produksi perkategori tanaman dimasing – masing Pabrik Gula tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian tak pisahkan dari peraturan ini.

BAB V
FAKTOR PRODUKSI

Bagian Pertama
BIBIT
Pasal 10

1. Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu khususnya Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) menjadi tanggungjawab Pabrik Gula.

2. Kebun Bibit Datar (KBD) disediakan oleh petani masing - masing atau kelompok tani yang dikoordinasikan oleh Dinas dan Pabrik Gula sedangkan kekurangannya disediakan oleh Pabrik Gula.
3. Sumber Bibit Kebun Bibit Datar (KBD) yang dikelola oleh petani Penangkar harus berasal dari kebun Bibit induk (KBI) yang dikelola oleh Pabrik Gula/P3GI/PUSLITAGRO.
4. Bibit yang digunakan harus merupakan benih bina yang telah disertifikasi oleh UPTD Balai Pengembangan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan/atau Institusi di luar Provinsi Jawa Barat yang berwenang mensertifikasi bibit tebu.

Pasal 11

1. Penanaman tebu tanaman pertama (Plant Cane) menggunakan benih bina bersertifikat, berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD).
2. Penggunaan bibit asal top stek dari dan untuk tanaman pertama untuk kondisi tertentu hanya diperbolehkan maksimal 10% (Sepuluh persen).
3. Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas benih bina baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan kondisi daerah setempat.
4. Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Kantor Perwakilan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (KP-P3GI) Cirebon, dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk menjamin tingkat kemasakan tebu, maka varietas yang ditanam harus disesuaikan dengan komposisi tingkat kemasakan tebu, yaitu varietas masak awal, tengah dan akhir.

Pasal 12

Pabrik Gula bersama Dinas dan KP - P3GI Cirebon menyeleksi lahan sawah dan tegalan yang layak untuk lokasi pengembangan bibit tanaman tebu.

Pasal 13

1. Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan bibit varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu bibit serta penyelenggaraan kebun – kebun peragaan antara lain berupa warung tebu yang memperagakan jenis tebu unggul varietas baru yang dilaksanakan oleh Pabrik Gula dan kelompok tani melibatkan DPC – APTRI masing – masing, KP – P3GI Cirebon dan Dinas.
2. Rencana Areal Kebun Bibit Datar (KBD) Tebu Musim Tanam Tahun 2015/2016 seluas 250,52 Ha (Dua Ratus Lima Puluh koma Lima Puluh Dua Hektar) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan tebu seluas 1.503,14 Ha (Seribu Lima Ratus Tiga koma Empat Belas Hektar) dengan penangkaran 1 : 6.
3. Rincian Areal Kebun, Bibit setiap wilayah Pabrik Gula sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

1. Pengawasan terhadap peredaran benih/bibit, dilakukan oleh :
 - a. Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
 - b. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 - c. Kantor Perwakilan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Cirebon.
2. Harga jual benih/bibit tebu asal KBD sebesar Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/Ku franko kebun tanam dengan kebutuhan setiap hektarnya seberat 80 Ku.
3. Dalam hal terjadi kekurangan benih/bibit tebu yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan dari luar Daerah, harus menggunakan bibit yang sudah bersertifikat dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua
Pupuk dan Pestisida

Pasal 15

1. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta PTR, dilaksanakan oleh Koperasi yang ditunjuk oleh Distributor.
2. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Koperasi Sekunder yang bergerak di bidang Tebu Rakyat.
3. Harga pupuk yang dibayar petani mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 16

1. Rencana kebutuhan pupuk untuk Program PTR Musim Tanam Tahun 2015/2016 untuk areal pengembangan areal seluas 7.441,54 Ha (Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu koma Lima Puluh Empat Hektar), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. ZA sebanyak 3.720,77 ton;
 - b. PHONSKA sebanyak 4.464,92 ton;
2. Rincian kebutuhan pupuk PTR untuk Musim Tanam Tahun 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Berdasarkan Pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi, Dinas/Badan/Lembaga berwenang.

Pasal 17

Dinas dan Badan berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh Instansi Teknis sesuai prinsip 6 (Enam) tepat, yaitu : tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat dan tepat harga.

Bagian Ketiga
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Pasal 18

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.
2. Pengendalian hama penggerek tebu secara biologis disediakan dan disalurkan oleh Pabrik Gula kepada petani TR secara cuma-cuma, yang penyebarannya menjadi tanggungjawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.
3. Dalam hal timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, pemerintah melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas dan Badan yang berwenang serta dilaksanakan secara serentak dan masal, dengan menggerakkan regu pengendali hama/penyakit dan para petani secara terpadu.

Bagian Keempat
Pengairan
Pasal 19

1. Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas dalam Rapat Panitia Irigasi setempat.
2. Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai ditingkat tersier.
3. Pengusahaan tebu tidak boleh mengakibatkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

Pasal 20

Pengelolaan air dalam kelompok Tani PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai setempat.

Pasal 21

1. Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan sama, terutama pada lahan sawah teknis.
2. Dalam Rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan sistem pengairan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman tebu.
3. Rencana pengembangan sistem pengairan, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menangani pengairan dan instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah sungai.
4. Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

Pasal 22

1. Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air pada musim kemarau, jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu dilakukan oleh Panitia Irigasi dengan P3A Mitra Cai dan diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani. ✓
2. Panitia Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air setempat.

Pasal 23

1. Dalam hal areal TR mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, Tim Pembina Program PTR khususnya unsur Panitia Irigasi setempat bersama dengan Pabrik Gula, mengambil langkah – langkah untuk membantu petani peserta TR dalam mengatasi masalah tersebut.
2. Petani turut menanggung biaya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarnya ditentukan oleh Tim Pembina Program PTR Kabupaten setempat setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Bagian Kelima
Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 24

1. Wilayah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam – macam dan jenis kegiatan.
2. Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh petani, kelompok tani, koperasi, Pabrik Gula, atau Perusahaan Swasta pelayanan jasa alat/mesin pertanian.

BAB VI
BIAYA USAHA TANI

Pasal 25

1. Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program PTR dalam kegiatan usaha tani, dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, kredit program serta dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pola bergulir yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
2. Rencana kebutuhan kredit setiap hektar untuk kategori program PTR Musim Tanam Tahun 2015/2016 adalah sebagai berikut :
 - a. TRS I, sebesar Rp. 24.800.000,- (Dua Puluh Empat juta Delapan Ratus Ribu rupiah);
 - b. TRS II, sebesar Rp. 17.660.000,- (Tujuh belas juta Enam ratus Enam Puluh ribu rupiah);
 - c. TRT I, sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh Tiga juta rupiah);
 - d. TRT II/III/IV, sebesar Rp. 16.860.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
3. Rincian rencana kebutuhan kredit setiap hektar untuk kategori tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 26

1. Paket kredit per kategori tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) merupakan paket kredit maksimal dan rincian pasal 25 (3), yang besarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik di lapangan.
2. Paket kredit direalisasikan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budaya tebu di lapangan.
3. Penerima KKP - E adalah petani/kelompok pemilik atau petani penggarap dengan luas lahan maksimal 4 Ha (Empat Hektar) dan tidak melebihi plafon kredit Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 27

1. Bank pelaksana/pemberi kredit yang melayani Program PTR Musim Tanam Tahun 2015/2016 adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank BJB, dan Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).
2. Plafon kredit maksimal yang dibutuhkan untuk merealisasikan program PTR pada setiap musim tanam di sesuaikan dengan luas sasaran areal yang ditetapkan Bupati.

Pasal 28

1. Bupati menunjuk Koperasi yang akan melayani penyaluran dana kredit KKP-E dan pengelola dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2015/2016 atas usulan Tim Teknis yang terdiri dari Dinas yang menangani Bidang Perkebunan, APTRI dan Pabrik Gula setempat.
2. Apabila dana kredit Program PTR dan dana PMUK Musim Tanam Tahun 2015/2016 mengalami keterlambatan dan/atau tidak memadai, maka Pabrik Gula selaku Perusahaan Mitra mengupayakan untuk menanggulangnya sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bank pelaksana dan Koperasi pengelola dana PMUK yang bersangkutan.

BAB VII
PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Pertama
Tebang Angkut
Pasal 29

1. Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (Lima belas) hari sekali FMPG/FMPW merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di Pabrik Gula.
2. Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman dan kapasitas giling Pabrik Gula dengan ketentuan wilayah kerja Pabrik Gula dipandang sebagai satu kesatuan wilayah produksi.
3. Pabrik Gula wajib memberitahukan kepada kelompok Tani peserta TR hasil analisis kemasakan tebu dan jadwal tebang yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama musyawarah FMPG/FMPW.
4. Perubahan Jadwal tebang hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 30

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan;
- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke Pabrik Gula dalam keadaan bersih dan segar selambat – lambatnnya 36 (Tiga puluh Enam) jam setelah tebang.

Pasal 31

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil TR adalah sebagai berikut :

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan oleh petani/kelompok tani dengan bimbingan Pabrik Gula.

- b. Dalam hal Petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi atau Pabrik Gula yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. Pabrik gula bersama-sama dengan petani mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik;
- d. Pabrik Gula memberitahukan kepada Kelompok tani peserta TR dan Koperasi mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun setiap harinya;
- e. Dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh Koperasi atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya tebang angkut yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG, dan hasilnya ditetapkan oleh Bupati;
- f. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib menyaksikan dan mengawasi penimbangan tebu dari kelompok tani yang bersangkutan;
- g. Dalam rangka mencegah kebakaran tebu, kegiatan kletakan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifikasikan terutama pada masa tebangan, yang dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat.

Bagian Kedua
Pengolahan
Pasal 32

1. Petani TR di wilayah kerja Pabrik Gula wajib menyerahkan seluruh hasil tebu kepada Pabrik Gula untuk diolah.
2. Dalam hal Pabrik Gula tidak dapat menggiling/menampung seluruh hasil tebu asal TR di wilayah kerjanya, maka kelebihan hasil tebu harus digiling pada Pabrik Gula lain di Wilayah Cirebon berdasarkan musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan Tim Pengembangan Program Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon, dikoordinasikan dengan PT. PG. Rajawali II, dengan memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.
3. Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan ketentuan tetap mempergunakan angkutan yang telah dikontrak oleh Koperasi/Pabrik Gula.

4. Dalam hal pengolahan tebu dilaksanakan lebih dari 36 (Tiga Puluh Enam) jam sesudah tebu ditebang, akibat dari keterlambatan menjadi tanggungjawab Pabrik Gula dan/atau Koperasi yang melaksanakan tebang angkut.
5. Perhitungan rendemen tebu hasil TR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Rendemen tebu petani TR ditentukan untuk setiap kebun.
7. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib menyaksikan dan mengawasi proses perhitungan rendemen dari kelompok tani yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil
Pasal 33

1. Bagi hasil TR dilaksanakan secara musyawarah dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk rendemen tebu sampai dengan 6% (Enam persen);
 - hablur bagian petani adalah 66% (Enam Puluh Enam persen) dari rendemen tebu yang dicapai;
 - hablur bagian Pabrik Gula adalah 34% (Tiga Puluh Empat persen) dari rendemen tebu yang di capai;
 - b. Untuk rendemen tebu 6% (Enam persen) ke atas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus :
$$T = \{(66\%) \times (6\%) \times Ku.TEBU\} + \{(70\%) (R1)\} \times Ku.TEBU$$
 dan $P = 100 - T$

T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu.

P = adalah hablur bagian Pabrik Gula dalam % dari rendemen tebu.

R1 = Selisih rendemen tebu petani diatas 6%.
2. Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kwintal tebu yang diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.
3. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/hamparan Kelompok Tani selesai diolah di Pabrik Gula yang bersangkutan.

4. Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sebanyak 3 kg (Tiga kilogram) tetes untuk setiap kwintal tebu.
5. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perhitungan bagi hasil gula dan tetes bagian petani, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali.

Bagian Keempat
Pemasaran Gula dan Tetes
Pasal 34

1. Gula bagian petani dipasarkan melalui sistem lelang yang dilaksanakan oleh Koperasi Sekunder Petani Tebu dan diawasi oleh APTRI dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga pasar yang wajar serta atas dasar negosiasi antara petani dan pembeli.
2. Petani/Kelompok Tani yang mengolah tebu ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil, menerima hasil gula sebesar 90% (Sembilan Puluh persen) dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga rata-rata lelang di setiap pabrik gula dari periode satu sampai dengan akhir periode giling. Setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula serta guliran PMUK, sedangkan sisanya sebanyak 10 % (Sepuluh persen) dalam bentuk natura.
3. Dalam hal lelang gula yang dimaksud pasal 34 ayat (1) terdiri dari gula TR Kemitraan dan gula TR Mandiri.

Pasal 35

1. Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar berdasarkan musyawarah, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten.
2. Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga tetes di pasaran lokal dan harga ekspor.

BAB VIII
PENGEMBALIAN BIAYA USAHA TANI

Pasal 36

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula petani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan Kelompok Tani/Koperasi, sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani menyerahkan hasil panen tebuinya kepada Pabrik Gula untuk digiling;
- b. Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan Delivery Order (DO), yang tembusannya diserahkan kepada kelompok tani/APTRI;
- c. Kelompok Tani/APTRI memasarkan gulanya melalui prosedur lelang atas dasar tembusan Delivery Order (DO) yang diterbitkan Pabrik Gula;
- d. Pemenang lelang membayar harga gula kelompok Tani melalui rekening Pabrik Gula yang bersangkutan, selanjutnya Pabrik Gula memperoleh bukti setoran dan menyerahkan DO asli kepada pemenang lelang;
- e. Berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari Pabrik Gula tersebut, pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari Kelompok Tani/APTRI ke Pabrik Gula;
- f. Pabrik Gula menerima uang setoran penebusan DO asli dari pemenang lelang untuk selanjutnya Pabrik Gula memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman Kelompok Tani bersangkutan baik ke Pabrik Gula, Bank Pelaksana (KKP-E), maupun Koperasi (PMUK) serta membuat surat/bukti pelunasan bagi kelompok Tani yang telah melunasi pinjamannya;
- g. Sisa uang setoran yang diterima dari pemenang lelang setelah dikurangi pembayaran pinjaman-pinjaman Kelompok Tani yang bersangkutan kepada Koperasi Pengelola Dana PMUK, Kantor Cabang Bank Pelaksana maupun Pabrik Gula yang bersangkutan, diberikan kepada Kelompok Tani yang bersangkutan sesuai dengan pasal 34 ayat (2) ;
- h. Pengembalian dana kredit KKP-E dan dana PMUK dilaksanakan oleh Pabrik Gula yang bersangkutan, untuk selanjutnya disetor ke Bank Pelaksana Kredit KKP- E dan rekening Tripple Account Koperasi Pengelola Dana PMUK di Bank yang bersangkutan;
- i. Bagi areal tebu rakyat pada musim tanam Tahun 2015/2016 (Satu Tahun musim tanam) mengalami kerugian/tunggakan, pengembalian tunggakan kredit dan PMUK akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Kelompok Tani
Pasal 37

Dalam pelaksanaan Program PTR, Petani/Kelompok Tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula.

Pasal 38

Hubungan kemitrausahaan antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan penyerapan teknologi oleh kelompok tani, agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan yaitu dalam hal :

- a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis Usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal;
- b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;
- c. Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional;
- d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara Kelompok Tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan Koperasi Petani Tebu;
- e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

Pasal 39

Kelompok Tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat secara efisien, berupa :

- a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran;
- b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani;
- c. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui Koperasi bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berazaskan manfaat dan kesetaraan.

Pasal 40

1. Kelompok Tani mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun RDK dan RDKK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanam yaitu pada bulan April;
 - b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
 - c. Menyusun Rencana Kerja Kelompok Tani;
 - d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan;

- e. Aktif dalam mengembangkan Lembaga Musyawarah FMPG dan FMPW.
2. Dalam wadah Koperasi, Kelompok Tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha taninya.

Bagian Kedua
ASOSIASI PETANI TEBU RAKYAT INDONESIA (APTRI)
Pasal 41

1. Petani sebagai pelaksana program PTR dihimpun dalam APTRI sebagai wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
2. APTRI berperan aktif untuk meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara petani, Pabrik Gula dan Perbankan.
3. APTRI dapat memperjuangkan aspirasi petani tebu dalam sistem kemitraan dengan Pabrik Gula yang didasarkan pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Koperasi
Pasal 42

1. Pembinaan kepada Koperasi peserta program PTR, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya;
2. Peningkatan kerjasama Koperasi dengan Pabrik Gula, diarahkan pada berkembangnya hubungan kemitraan dan meningkatnya kemampuan, serta keterampilan pengurus dan petugas Koperasi dalam pengelolaan dan pelayanan.
3. Koperasi berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.

Pasal 43

Koperasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran calon peserta program PTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu;
- b. Mengurus pengajuan serta pencairan kredit dan dana PMUK serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani/Kelompok Tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan Pabrik Gula;
- c. Mengurus pengembalian kredit dan dana PMUK dari Petani/Kelompok Tani serta mengembalikan kepada pemberi/pengelola kredit dan dana PMUK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyalurkan sarana produksi kepada Petani/ Kelompok Tani.

Bagian Keempat
Pabrik Gula
Pasal 44

Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL), mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
- b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada Petani/Kelompok Tani;
- c. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan Petani/Kelompok Tani;
- d. Membimbing Koperasi dalam pelayanan kredit, dana PMUK dan sarana produksi kepada Petani/Kelompok Tani;
- e. Membimbing Petani/Kelompok Tani di wilayah kerjanya dalam kegiatan produksi;
- f. Bersama kelompok tani menyusun rencana Usaha Tani Tebu di wilayah kerjanya yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari alih guna lahan sampai pemasaran hasil, serta membantu proses penyelesaian RDKK dan pengurusan kredit serta sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
- g. Mendorong Petani/Kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menetapkan teknologi anjuran Hasta Usaha Tani Tebu dalam wadah FMPG/FMPW;
- h. Membina Koperasi di Wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit, dan PMUK dan sarana produksi secara tepat;
- i. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KPTR di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima
Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya
Pasal 45

1. Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan.
2. Setiap Pabrik Gula harus menumbuh kembangkan unit-unit riset dan pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air.

Bagian Keenam
Penyuluh Pertanian
Pasal 46

1. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok hampan dengan bimbingan Penyuluh dan Sinder Pabrik Gula yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan Kelompok Tani dan Koperasi serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
2. Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa dan lembaga komunikasi yang ada di masyarakat.
3. Dalam hal pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalita, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Pasal 47

1. Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Badan.

3. Peranan Pemimpin formal dan non formal di perdesaan, ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/Kelompok Tani.

BAB X
PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pasal 48

1. Penguatan modal usaha diberikan dalam bentuk dana tunai dari dana APBN atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh Kelompok Tani dan/atau Koperasi, untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan dan selanjutnya digulirkan.
2. Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha Kelompok Petani dalam Agribisnis tebu dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi aktif anggotanya.
3. Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha Kelompok Tani/Koperasi di bidang penyediaan bibit, sarana produksi dan jasa pembongkaran ratoon, dengan bimbingan teknis Pabrik Gula dan Dinas.
4. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah dana perguliran PMUK yang telah ada dalam rekening *Tripple Account* Koperasi Pengelola Dana PMUK.
5. Paket Dana PMUK direalisasi secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan.

Pasal 49

Tata cara pelaksanaan PMUK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

1. Biaya operasional pembinaan dan penyelenggaraan PTR khususnya dalam mendukung kegiatan non budidaya yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, penyuluhan dan koordinasi bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;

- c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
2. Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat untuk mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula.

BAB XII
KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 51

Dinas secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan program PTR.

Pasal 52

1. Koordinasi dalam program PTR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintahan Daerah diwakili oleh Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di tingkat Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Dinas Kabupaten sebagai koordinator teknis operasional pergulaan di Kabupaten setempat;
 - c. Pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/Koperasi, Bank pelaksana, dan Pabrik Gula sebagai pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) di bawah koordinasi Dinas Kabupaten; dan
 - d. Di tingkat wilayah kerja Pabrik gula yang berada di satu wilayah Kabupaten, Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) bertindak sebagai :
 1. Forum temu usaha antara kelompok Tani/Koperasi, dan Pabrik Gula;
 2. Forum penyusunan rencana operasional;
 3. Forum koordinasi pemecahan masalah;
 4. Forum kesepakatan antara kelompok Tani/Koperasi dan Pabrik Gula; dan
 5. Pusat informasi pelaksanaan program PTR.
 - e. Di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan program PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW) yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPW.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPG) yang bertugas mengamati panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanaman,

mutu bibit, penyaluran kredit, pupuk, dan perlindungan tanaman.

Pasal 53

Untuk mendukung kelancaran operasional program PTR di Kabupaten di bentuk Tim Pembina Tebu Rakyat Kabupaten.

BAB XIII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 54

1. Pengendalian pelaksanaan Program PTR merupakan tanggung jawab Bupati.
2. Pengendalian pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit KKP-E, penyaluran dan perguliran dana PMUK, sarana produksi, permodalan pasca panen dan pemasaran, serta pengembalian kredit.
3. Dalam melaksanakan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penerapan sistem pengendalian, hingga ke Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPPG (Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula);
 - b. Pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi massa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang berakar di masyarakat;
 - c. Pengendalian teknologi pertebuan/pergulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai dimasing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan oleh Pusat Penelitian dan Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), bekerjasama dengan lembaga riset.

Pasal 55

Pabrik Gula, Koperasi Pelaksana Program PTR, UPT-PTR berkewajiban memberikan laporan secara periodik setiap awal bulan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2014/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon;

Ditetapkan di SUMBER
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI CIREBON,
TTD
SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104 SERIE.98..

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

RENCANA SASARAN AREAL TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016

| NO | URAIAN | LUAS AREAL (Ha) | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | | KABUPATEN CIREBON | | | |
| | | Sindang laut | Karangsuwung | Tersana Baru | Jumlah |
| 1 | TRS I | 449,57 | 332,99 | 699,58 | 1.482,14 |
| | TRS II | 1.716,62 | 1.557,01 | 1.366,46 | 4.640,09 |
| Jumlah TRS | | 2.166,19 | 1.890,00 | 2.066,04 | 6.122,23 |
| 2 | TRT I | 12,50 | - | 8,50 | 21,00 |
| | TRT II | 54,90 | - | 124,00 | 178,90 |
| | TRT III | 106,41 | - | 33,00 | 139,41 |
| | Jumlah TRT | 173,81 | - | 165,50 | 339,31 |
| 3 | TR Mandiri | - | 30,00 | 950,00 | 980,00 |
| Jumlah TRM | | - | 30,00 | 950,00 | 980,00 |
| TOTAL | | 2.340,00 | 1.920,00 | 3.181,54 | 7.441,54 |

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104 SERI E.98

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016

| NO | Pabrik Gula / Kategori Tanaman | Luas (Ha) | Produksi | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | Ton Tebu | | Rendemen (%) | Ton Hablur | |
| | | | Jumlah | Per Ha | | Jumlah | Per Ha |
| 1 | TRS I | 1.482,14 | 112.718,69 | 76,05 | 7,39 | 8.330,68 | 5,62 |
| | TRS II | 4.640,09 | 321.338,26 | 69,25 | 7,21 | 23.162,46 | 4,99 |
| Jumlah | | 6.122,23 | 434.056,95 | 70,90 | 7,26 | 31.493,14 | 5,14 |
| 2 | TRT I | 21,00 | 1.410,00 | 67,14 | 7,42 | 104,69 | 4,99 |
| | TRT II | 178,90 | 11.738,30 | 65,61 | 6,95 | 816,24 | 4,56 |
| | TRT III | 139,41 | 8.889,05 | 63,76 | 7,21 | 640,87 | 4,60 |
| Jumlah | | 339,31 | 22.037,35 | 64,95 | 7,09 | 1.561,80 | 4,60 |
| 3 | TR Mandiri | 980,00 | 76.800,00 | 78,37 | 6,85 | 5.263,50 | 5,37 |
| TOTAL | | 7.441,54 | 532.894,30 | 71,61 | 7,19 | 38.318,44 | 5,15 |

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR

SERI

LAMPIRAN III PERATURAN CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

KEBUTUHAN BIBIT TEBU ALOKASI TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016

| NO | PABRIK GULA | KTG (Ha) | PLANE CANE (Ha) | SULAM (Ha) | KBP (Ha) | KBN (Ha) | KBI (Ha) | KBD (Ha) | Jumlah (Ha) |
|----|-----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | Cirebon | | | | | | | | |
| | PG Sindang Laut | 2.340,00 | 462,07 | 234,00 | 0,36 | 2,14 | 12,84 | 77,01 | 92,34 |
| | PG Karangsuwung | 1.920,00 | 332,99 | 192,00 | 0,26 | 1,54 | 9,25 | 55,50 | 66,55 |
| | PG Tersana Baru | 3.181,54 | 708,08 | 318,15 | 0,55 | 3,28 | 19,67 | 118,01 | 141,51 |
| | Jumlah | 7.441,54 | 1.503,14 | 744,15 | 1,16 | 6,96 | 41,75 | 250,52 | 300,40 |

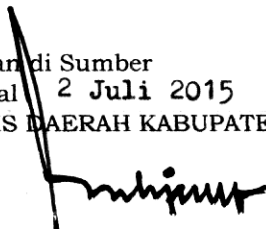
Keterangan : Penangkaran Bibit diproyeksikan 1:6
untuk KBP, KBN, KBI dilaksanakan oleh PT. PG. Rajawali II Cirebon

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104SERI E.98

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016

| NO | Kategori Tanaman | Luas (Ha) | Kebutuhan pupuk (Ton) | | |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | ZA | Phonska | Jumlah |
| 1 | TRS I | 1.482,14 | 741,07 | 889,28 | 1.630,35 |
| | TRS II | 4.640,09 | 2.320,05 | 2.784,06 | 5.104,10 |
| Jumlah | | 6.122,23 | 3.061,12 | 3.673,34 | 6.734,46 |
| 2 | TRT I | 21,00 | 10,50 | 12,60 | 23,10 |
| | TRT II | 178,90 | 89,45 | 107,34 | 196,79 |
| | TRT III | 139,41 | 69,70 | 83,64 | 153,35 |
| Jumlah | | 339,31 | 169,65 | 203,58 | 373,24 |
| 3 | TR Mandiri | 980,00 | 490,00 | 588,00 | 1.078,00 |
| | Jumlah | 980,00 | 490,00 | 588,00 | 1.078,00 |
| TOTAL | | 7.441,54 | 3.720,77 | 4.464,92 | 8.185,70 |

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104 SERI E.98

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

RENCANA KEBUTUHAN KREDIT KKP-E TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016

| NO | URAIAN | TRS I (Rp/Ha) | TRS II (Rp/Ha) | TRT I (Rp/Ha) | TRT II-III (Rp/Ha) |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Biaya garap dan pemeliharaan | 8.000.000 | 5.600.000 | 6.700.000 | 5.000.000 |
| 2 | Biaya tebang dan angkut | 6.500.000 | 6.240.000 | 6.000.000 | 6.040.000 |
| 3 | Biaya beban hidup | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Benih/Bibit | 5.600.000 | 1.120.000 | 5.600.000 | 1.120.000 |
| 5 | Pupuk | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 6 | Pengendalian OPT dan aplikasi PPC | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Jumlah | | 24.800.000 | 17.660.000 | 23.000.000 | 16.860.000 |

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 15 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104 SERI E.98

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

**RENCANA KEBUTUHAN KREDIT KKP-E TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016
KABUPATEN CIREBON**

| NO | Pabrik Gula / Kategori Tanaman | Luas (Ha) | Kebutuhan KKP-E | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | | | Rp / Ha | Jumlah |
| I. | Kabupaten Cirebon | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | |
| | TRS I | 1.482,14 | 24.800.000,00 | 36.757.072.000,00 |
| | TRS II | 4.640,09 | 17.660.000,00 | 81.944.060.040,00 |
| | Jumlah | 6.122,23 | | 118.701.132.040,00 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | |
| | TRT I | 21,00 | 23.000.000,00 | 483.000.000,00 |
| | TRT II | 178,90 | 16.860.000,00 | 3.016.254.000,00 |
| | TRT III | 139,41 | 16.860.000,00 | 2.350.402.020,00 |
| | Jumlah | 339,31 | | 5.849.656.020,00 |
| 3 | TRM | 980,00 | - | - |
| | Total | 7.441,54 | | 124.550.788.060,00 |

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104 SERI E.98

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT,
FORUM MUSYAWARAH PRODUKSI GULA (FMPG), FORUM MUSYAWARAH PRODUKSI
WILAYAH (FMPW) DAN KELOMPOK KERJA PENGAMAT PRODUKSI GULA (KKPPG)

- 1 Susunan Tim Pembina Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon MTT. 2015/2016
 - a. Penanggung jawab : Bupati Cirebon
 - b. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan
 - d. Anggota :
 - 1 Unsur Bagian Perekonomian Setda
 - 2 Unsur Bagian Sumber Daya Alam Setda
 - 3 Unsur Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan
 - 4 Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Mikro dan Menengah
 - 5 Unsur BKP5K
 - 6 Unsur Dinas pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
 - 7 Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 8 Unsur Direksi PT. RNI II Cirebon
 - 9 Unsur P3GI KP Cirebon
 - 10 Unsur BANK Pemberi Kredit
 - 11 Unsur DPD APTRI Jawa Barat
 - 12 Unsur Distributor Pupuk Cirebon (PUSKOPETRA)
- 2 Susunan Forum Musyawarah Produksi Gula
 - a. Ketua : General Manager Unit PG. Sindang Laut, Karangsungung, Tersana Baru
 - b. Wakil Ketua : Ketua DPC APTRI Sindang Laut, Karangsungung, Tersana Baru
 - c. Sekretaris : Kepala UPT PTR Sindang Laut, Karangsungung, Tersana Baru
 - d. Anggota :
 - 1 Unsur DPC APTRI
 - 2 Perwakilan Petani dari FMPW
 - 3 Koperasi / KUD Pelaksana Tebu Rakyat
 - 4 Unsur Kecamatan
 - 5 Unsur Pabrik Gula
 - 6 Pelaksana Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan
 - 7 Unsur BKP5K
- 3 Susunan Musyawarah produksi Wilayah
 - a. Ketua : Sinder Kebun Wilayah
 - b. Sekretaris : Pelaksana UPT PTR Sindang Laut, Karangsungung, Tersana Baru
 - c. Anggota :
 - 1 Ketua Kelompok Tani Tebu Rakyat
 - 2 KUD / KPTR
 - 3 Kuwu
 - 4 P3A Mitra Cai
- 4 Susunan Tim Kelompok Kerja Pengamat Produksi gula
 - a. Ketua : Dari Anggota KKPPG yang terpilih
 - b. Sekretaris : Pelaksana UPT PTR Sindang Laut, Karangsungung, Tersana Baru
 - c. Anggota : Perwakilan Petani yang diajukan dan disetujui FMPG

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada Tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 104 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juni 2015

PESERTA PENYALUR KKP-E TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016

| NO | Uraian | BADAN HUKUM | |
|----|--|---------------------------|------------------|
| | | NOMOR | TANGGAL |
| 1 | KPTR Sakarosa Srikandi - Sindang Laut | 22/BH/KDK 10.17/X/1998 | 28 Oktober 1998 |
| 2 | Koperasi Agribisnis Harum Manis - Karangsuwung | 07/BH/KUKM.PM/IV/2006 | 06 April 2006 |
| 3 | Koperasi Agribisnis Tani Abadi - Babakan | 02/BH/KUKM.PM/11/2005 | 22 Februari 2005 |
| 4 | KPTR Sari Manis - Pasaleman | 04/BH/KUKM.PM/VI/2007 | 20 Juni 2007 |
| 5 | Koperasi Agro Bisnis Sari Mekar - Waled | 7243/BH/PAD/I/2013 | 11 Januari 2013 |
| 6 | KUD Sri Madu - Gebang | 7565/BH/ / /1988 | 10 Agustus 1988 |
| 7 | KUD Darma Bakti - Babakan | 6381/BH/ / /1987 | 05 Januari 1987 |
| 8 | KUD Eka Mulya - Ciledug | 6386/BH/ / /1989 | 02 Januari 1989 |
| 9 | KUD Sri Jaya - Pabedilan | 6384/BH/PAD/KWK.10/1/1997 | 24 Oktober 1997 |
| 10 | Kelompok / Petani Dengan memenuhi berbagai persyaratan | | |

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumbar
pada Tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 104 SERI E.98

**RENCANA KEBUTUHAN KREDIT KKP-E TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016
KABUPATEN CIREBON**

| NO | Pabrik Gula / Kategori Tanaman | Luas (Ha) | Kebutuhan KKP-E | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | | | Rp / Ha | Jumlah (Rp) |
| I. PG Sindang Laut | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | |
| | TRS I | 449,57 | 24.800.000,00 | 11.149.336.000,00 |
| | TRS II | 1.716,62 | 17.660.000,00 | 30.315.579.840,00 |
| | Jumlah | 2.166,19 | | 41.464.915.840,00 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | |
| | TRT I | 12,50 | 23.000.000,00 | 287.500.000,00 |
| | TRT II | 54,90 | 16.860.000,00 | 925.614.000,00 |
| | TRT III | 106,41 | 16.860.000,00 | 1.794.022.020,00 |
| | Jumlah | 173,81 | | 3.007.136.020,00 |
| 3 | TRM | - | | |
| | Total | 2.340,00 | | 44.472.051.860,00 |
| II. PG Karangsuwung | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | |
| | TRS I | 332,99 | 24.800.000,00 | 8.258.152.000,00 |
| | TRS II | 1.557,01 | 17.660.000,00 | 27.496.796.600,00 |
| | Jumlah | 1.890,00 | | 35.754.948.600,00 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | |
| | TRT I | - | 23.000.000,00 | - |
| | TRT II | - | 16.860.000,00 | - |
| | TRT III | - | 16.860.000,00 | - |
| | Jumlah | - | | - |
| 3 | TRM | 30,00 | | |
| | Total | 1.920,00 | | 35.754.948.600,00 |
| III. PG Tersana Baru | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | |
| | TRS I | 699,58 | 24.800.000,00 | 17.349.584.000,00 |
| | TRS II | 1.366,46 | 17.660.000,00 | 24.131.683.600,00 |
| | Jumlah | 2.066,04 | | 41.481.267.600,00 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | |
| | TRT I | 8,50 | 23.000.000,00 | 195.500.000,00 |
| | TRT II | 124,00 | 16.860.000,00 | 2.090.640.000,00 |
| | TRT III | 33,00 | 16.860.000,00 | 556.380.000,00 |
| | Jumlah | 165,50 | | 2.842.520.000,00 |
| 3 | TRM | 950,00 | - | |
| | Total | 3.181,54 | | 44.323.787.600,00 |
| IV. Kabupaten Cirebon | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | |
| | TRS I | 1.482,14 | 24.800.000,00 | 36.757.072.000,00 |
| | TRS II | 4.640,09 | 17.660.000,00 | 81.944.060.040,00 |
| | Jumlah | 6.122,23 | | 118.701.132.040,00 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | |
| | TRT I | 21,00 | 23.000.000,00 | 483.000.000,00 |
| | TRT II | 178,90 | 16.860.000,00 | 3.016.254.000,00 |
| | TRT III | 139,41 | 16.860.000,00 | 2.350.402.020,00 |
| | Jumlah | 339,31 | | 5.849.656.020,00 |
| 3 | TRM | 980,00 | - | |
| | Total | 7.441,54 | | 124.550.788.060,00 |

SASARAN AREAL TANAMAN TEBU MTT. 2015/2016
KABUPATEN CIREBON

| PABRIK GULA | Kategori Tanaman (Ha) | | | | | | | | Jml Total (Ha) |
|------------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|--------|--------|---------|---------------|---------------------|
| | TRS (Sawah) | | | TRT (Tegalan) | | | | TR Nandiri | |
| | I | II | Jml TRS | I | II | III | Jml TRT | | |
| PG. SINDANG LAUT | 449,57 | 1.716,62 | 2.166,19 | 12,50 | 54,90 | 106,41 | 173,81 | - | 2.340,00 |
| PG. KARANGSUWUNG | 332,99 | 1.557,01 | 1.890,00 | - | - | - | - | 30,00 | 1.920,00 |
| PG. TERSANA BARU | 699,58 | 1.366,46 | 2.066,04 | 8,50 | 124,00 | 33,00 | 165,50 | 950,00 | 3.181,54 |
| JUMLAH | 1.482,14 | 4.640,09 | 6.122,23 | 21,00 | 178,90 | 139,41 | 339,31 | 980,00 | 7.441,54 |

SASARAN AREAL TANAMAN TEBU MTT. 2015/2016
PG TERSANA BARU

| NO | Kecamatan | Kategori Tanaman (Ha) | | | | | | | TR Nandiri | Jml Total (Ha) |
|---------------|---------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|--------|-------|---------|---------------|---------------------|
| | | TRS (Sawah) | | | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | | I | II | Jml TRS | I | II | III | Jml TRT | | |
| 1 | Arjawinangun | | | - | | | | - | | - |
| 2 | Astanajapura | | | - | | | | - | | - |
| 3 | Babakan | 150,00 | 139,55 | 289,55 | | | | - | 70,00 | 359,55 |
| 4 | Beber | | | - | | | | - | | - |
| 5 | Ciledug | 140,00 | 41,11 | 181,11 | | | | - | 75,00 | 256,11 |
| 6 | Ciwaringin | | | - | | | | - | | - |
| 7 | Depok | | | - | | | | - | | - |
| 8 | Dukupuntang | | | - | | | | - | | - |
| 9 | Gebang | 125,00 | 186,18 | 311,18 | | | | - | 100,00 | 411,18 |
| 10 | Gegesik | | | - | | | | - | | - |
| 11 | Gempol | | | - | | | | - | | - |
| 12 | Greged | | | - | | | | - | | - |
| 13 | Gunungjati | | | - | | | | - | | - |
| 14 | Jamblang | | | - | | | | - | | - |
| 15 | Kaliwedi | | | - | | | | - | | - |
| 16 | Kapetakan | | | - | | | | - | | - |
| 17 | Karangsembung | | | - | | | | - | | - |
| 18 | Karangwareng | | | - | | | | - | | - |
| 19 | Kedawung | | | - | | | | - | | - |
| 20 | Klangenan | | | - | | | | - | | - |
| 21 | Lemahabang | | | - | | | | - | | - |
| 22 | Losari | - | - | - | | | | - | | - |
| 23 | Mundu | | | - | | | | - | | - |
| 24 | Pabedilan | 80,00 | 100,22 | 180,22 | | | | - | 80,00 | 260,22 |
| 25 | Pabuaran | 45,00 | 45,31 | 90,31 | | | | - | 60,00 | 150,31 |
| 26 | Palimanan | | | - | | | | - | | - |
| 27 | Pangenan | | | - | | | | - | | - |
| 28 | Panguragan | | | - | | | | - | | - |
| 29 | Pasaleman | 80,00 | 793,92 | 873,92 | 8,50 | 80,00 | 33,00 | 121,50 | 450,00 | 1.445,42 |
| 30 | Plered | | | - | | | | - | | - |
| 31 | Plumbon | | | - | | | | - | | - |
| 32 | Sedong | | | - | | | | - | | - |
| 33 | Sumber | | | - | | | | - | | - |
| 34 | Suranenggala | | | - | | | | - | | - |
| 35 | Susukan | | | - | | | | - | | - |
| 36 | Susukanlebak | | | - | | | | - | | - |
| 37 | Talun | | | - | | | | - | | - |
| 38 | Tengah Tani | | | - | | | | - | | - |
| 39 | Waled | 79,58 | 60,17 | 139,75 | | 44,00 | | 44,00 | 115,00 | 298,75 |
| 40 | Weru | | | - | | | | - | | - |
| JUMLAH | | 699,58 | 1.366,46 | 2.066,04 | 8,50 | 124,00 | 33,00 | 165,50 | 950,00 | 3.181,54 |

SASARAN AREAL TANAMAN TEBU MTT. 2015/2016
KABUPATEN CIREBON

| NO | Kecamatan | Kategori Tanaman (Ha) | | | | | | | TR Mandiri | Jml Total (Ha) |
|----|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | TRS (Sawah) | | | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | | I | II | Jml TRS | I | II | III | Jml TRT | | |
| 1 | Arjawinangun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Astanajapura | 141,00 | 488,48 | 629,48 | - | - | - | - | - | 629,48 |
| 3 | Babakan | 156,85 | 296,74 | 453,59 | - | - | - | - | 77,10 | 530,69 |
| 4 | Beber | - | - | - | 9,00 | 25,00 | 44,00 | 78,00 | - | 78,00 |
| 5 | Ciledug | 140,00 | 41,11 | 181,11 | - | - | - | - | 75,00 | 256,11 |
| 6 | Ciwaringin | 8,00 | 21,25 | 29,25 | - | - | - | - | - | 29,25 |
| 7 | Depok | - | 38,99 | 38,99 | - | - | - | - | - | 38,99 |
| 8 | Dukupuntang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gebang | 190,47 | 362,40 | 552,87 | - | - | - | - | 100,00 | 652,87 |
| 10 | Gegesik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gempol | 15,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 12 | Greged | 46,30 | 26,75 | 73,05 | 3,50 | 11,40 | 24,50 | 39,40 | - | 112,45 |
| 13 | Gunungjati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jamblang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kaliwedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kapetakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Karangsembung | 159,01 | 588,69 | 747,70 | - | - | - | - | 6,85 | 754,55 |
| 18 | Karangwareng | 69,00 | 523,26 | 592,26 | - | - | - | - | 11,40 | 603,66 |
| 19 | Kedawung | - | 1,12 | 1,12 | - | - | - | - | - | 1,12 |
| 20 | Klangenan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lemahabang | 86,00 | 371,56 | 457,56 | - | 18,50 | 27,50 | 46,00 | - | 503,56 |
| 22 | Losari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mundu | 14,00 | 211,33 | 225,33 | - | - | - | - | - | 225,33 |
| 24 | Pabedilan | 80,00 | 100,22 | 180,22 | - | - | - | - | 80,00 | 260,22 |
| 25 | Pabuaran | 45,00 | 45,31 | 90,31 | - | - | - | - | 60,00 | 150,31 |
| 26 | Palimanan | - | 11,70 | 11,70 | - | - | - | - | - | 11,70 |
| 27 | Panganan | 50,01 | 238,44 | 288,45 | - | - | - | - | 4,65 | 293,10 |
| 28 | Panguragan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Pasaleman | 80,00 | 793,92 | 873,92 | 8,50 | 80,00 | 33,00 | 121,50 | 450,00 | 1.445,42 |
| 30 | Plered | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Plumbon | 7,00 | 3,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 32 | Sedong | - | 50,55 | 50,55 | - | - | 10,41 | 10,41 | - | 60,96 |
| 33 | Sumber | - | 10,70 | 10,70 | - | - | - | - | - | 10,70 |
| 34 | Suranenggala | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Susukan | - | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 36 | Susukanlebak | 53,13 | 145,95 | 199,08 | - | - | - | - | - | 199,08 |
| 37 | Talun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Tengah Tani | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Waled | 130,87 | 223,62 | 354,49 | - | 44,00 | - | 44,00 | 115,00 | 513,49 |
| 40 | Weru | 10,50 | 11,00 | 21,50 | - | - | - | - | - | 21,50 |
| | JUMLAH | 1.482,14 | 4.640,09 | 6.122,23 | 21,00 | 178,90 | 139,41 | 339,31 | 980,00 | 7.441,54 |

SASARAN AREAL TANAMAN TEBU MTT. 2015/2016
PG KARANGSUWUNG

| NO | Kecamatan | Kategori Tanaman (Ha) | | | | | | | TR Nandiri | Jml Total (Ha) |
|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|---------------------|
| | | TRS (Sawah) | | | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | | I | II | Jml TRS | I | II | III | Jml TRT | | |
| 1 | Arjawinangun | | | - | | | | - | | - |
| 2 | Astanajapura | | | - | | | | - | | - |
| 3 | Babakan | 6,85 | 81,41 | 88,26 | | | | - | 7,10 | 95,36 |
| 4 | Beber | | | - | | | | - | | - |
| 5 | Ciledug | | | - | | | | - | | - |
| 6 | Ciwaringin | | | - | | | | - | | - |
| 7 | Depok | | | - | | | | - | | - |
| 8 | Dukupuntang | | | - | | | | - | | - |
| 9 | Gebang | | | - | | | | - | | - |
| 10 | Gegesik | | | - | | | | - | | - |
| 11 | Gempol | | | - | | | | - | | - |
| 12 | Greged | | | - | | | | - | | - |
| 13 | Gunungjati | | | - | | | | - | | - |
| 14 | Jamblang | | | - | | | | - | | - |
| 15 | Kaliwedi | | | - | | | | - | | - |
| 16 | Kapetakan | | | - | | | | - | | - |
| 17 | Karangsembung | 149,01 | 536,84 | 685,85 | | | | - | 6,85 | 692,70 |
| 18 | Karangwareng | 69,00 | 523,26 | 592,26 | - | | | - | 11,40 | 603,66 |
| 19 | Kedawung | | 1,12 | 1,12 | | | | - | | 1,12 |
| 20 | Klangenan | | | - | | | | - | | - |
| 21 | Lemahabang | | | - | | | | - | | - |
| 22 | Losari | | | - | | | | - | | - |
| 23 | Mundu | | | - | | | | - | | - |
| 24 | Pabedilan | | | - | | | | - | | - |
| 25 | Pabuaran | | | - | | | | - | | - |
| 26 | Palimanan | | | - | | | | - | | - |
| 27 | Pangenan | 28,01 | 191,44 | 219,45 | | | | - | 4,65 | 224,10 |
| 28 | Panguragan | | | - | | | | - | | - |
| 29 | Pasaleman | | | - | | | | - | | - |
| 30 | Plered | | | - | | | | - | | - |
| 31 | Plumbon | | | - | | | | - | | - |
| 32 | Sedong | | | - | | | | - | | - |
| 33 | Sumber | | | - | | | | - | | - |
| 34 | Suranenggala | | | - | | | | - | | - |
| 35 | Susukan | | | - | | | | - | | - |
| 36 | Susukanlebak | 28,83 | 59,49 | 88,32 | | | | - | | 88,32 |
| 37 | Talun | | | - | | | | - | | - |
| 38 | Tengah Tani | | | - | | | | - | | - |
| 39 | Waled | 51,29 | 163,45 | 214,74 | | | | - | | 214,74 |
| 40 | Weru | | | - | | | | - | | - |
| JUMLAH | | 332,99 | 1.557,01 | 1.890,00 | - | - | - | - | 30,00 | 1.920,00 |

SASARAN AREAL TANAMAN TEBU MTT. 2015/2016
PG SINDANG LAUT

| NO | Kecamatan | Kategori Tanaman (Ha) | | | | | | | Jml Total (Ha) | |
|---------------|---------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|-------|--------|---------|------------------|----------|
| | | TRS (Sawah) | | | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | | I | II | Jml TRS | I | II | III | Jml TRT | | |
| 1 | Arjawinangun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Astanajapura | 141,00 | 488,48 | 629,48 | - | - | - | - | - | 629,48 |
| 3 | Babakan | - | 75,78 | 75,78 | - | - | - | - | - | 75,78 |
| 4 | Beber | - | - | - | 9,00 | 25,00 | 44,00 | 78,00 | - | 78,00 |
| 5 | Ciledug | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ciwaringin | 8,00 | 21,25 | 29,25 | - | - | - | - | - | 29,25 |
| 7 | Depok | - | 38,99 | 38,99 | - | - | - | - | - | 38,99 |
| 8 | Dukupuntang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gebang | 65,47 | 176,22 | 241,69 | - | - | - | - | - | 241,69 |
| 10 | Gegesik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gempol | 15,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 12 | Greged | 46,30 | 26,75 | 73,05 | 3,50 | 11,40 | 24,50 | 39,40 | - | 112,45 |
| 13 | Gunungjati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jamblang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kaliwedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kapetakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Karangsembung | 10,00 | 51,85 | 61,85 | - | - | - | - | - | 61,85 |
| 18 | Karangwareng | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kedawung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Klangenan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Lemahabang | 86,00 | 371,56 | 457,56 | - | 18,50 | 27,50 | 46,00 | - | 503,56 |
| 22 | Losari | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mundu | 14,00 | 211,33 | 225,33 | - | - | - | - | - | 225,33 |
| 24 | Pabedilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Pabuaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Palimanan | - | 11,70 | 11,70 | - | - | - | - | - | 11,70 |
| 27 | Panganan | 22,00 | 47,00 | 69,00 | - | - | - | - | - | 69,00 |
| 28 | Panguragan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Pasaleman | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Plered | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Plumbon | 7,00 | 3,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
| 32 | Sedong | - | 50,55 | 50,55 | - | - | 10,41 | 10,41 | - | 60,96 |
| 33 | Sumber | - | 10,70 | 10,70 | - | - | - | - | - | 10,70 |
| 34 | Suranenggala | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Susukan | - | 34,00 | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 |
| 36 | Susukanlebak | 24,30 | 86,46 | 110,76 | - | - | - | - | - | 110,76 |
| 37 | Talun | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Tengah Tani | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Waled | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Weru | 10,50 | 11,00 | 21,50 | - | - | - | - | - | 21,50 |
| JUMLAH | | 449,57 | 1.716,62 | 2.166,19 | 12,50 | 54,90 | 106,41 | 173,81 | - | 2.340,00 |

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016
KABUPATEN CIREBON

| NO | Pabrik Gula / Kategori Tanaman | Luas (Ha) | DOSIS PUPUK | | JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|
| | | | ZA | PHONSKA | ZA | PHONSKA |
| | | | Ton / Ha | (Ton / Ha) | (Ton) | (Ton) |
| I. PG Sindang Laut | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | |
| | TRS I | 449,57 | 0,50 | 0,60 | 224,79 | 269,74 |
| | TRS II | 1.716,62 | 0,50 | 0,60 | 858,31 | 1.029,97 |
| | Jumlah | 2.166,19 | | | 1.083,10 | 1.299,72 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | TRT I | 12,50 | 0,50 | 0,60 | 6,25 | 7,50 |
| | TRT II | 54,90 | 0,50 | 0,60 | 27,45 | 32,94 |
| | TRT III | 106,41 | 0,50 | 0,60 | 53,20 | 63,84 |
| | Jumlah | 173,81 | | | 86,90 | 104,28 |
| 3 | TRM | | | | | |
| | Total | 2.340,00 | | | 1.170,00 | 1.404,00 |
| II. PG Karangswung | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | |
| | TRS I | 332,99 | 0,50 | 0,60 | 166,50 | 199,79 |
| | TRS II | 1.557,01 | 0,50 | 0,60 | 778,51 | 934,21 |
| | Jumlah | 1.890,00 | | | 945,00 | 1.134,00 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | TRT I | - | 0,50 | 0,60 | - | - |
| | TRT II | - | 0,50 | 0,60 | - | - |
| | TRT III | - | 0,50 | 0,60 | - | - |
| | Jumlah | - | | | - | - |
| 3 | TRM | 30,00 | 0,50 | 0,60 | 15,00 | 18,00 |
| | Total | 1.920,00 | | | 960,00 | 1.152,00 |
| III. PG Tersana Baru | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | |
| | TRS I | 699,58 | 0,50 | 0,60 | 349,79 | 419,75 |
| | TRS II | 1.366,46 | 0,50 | 0,60 | 683,23 | 819,88 |
| | Jumlah | 2.066,04 | | | 1.033,02 | 1.239,62 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | TRT I | 8,50 | 0,50 | 0,60 | 4,25 | 5,10 |
| | TRT II | 124,00 | 0,50 | 0,60 | 62,00 | 74,40 |
| | TRT III | 33,00 | 0,50 | 0,60 | 16,50 | 19,80 |
| | Jumlah | 165,50 | | | 82,75 | 99,30 |
| 3 | TRM | 950,00 | 0,50 | 0,60 | 475,00 | 570,00 |
| | Total | 3.181,54 | | | 1.590,77 | 1.908,92 |
| IV. Kabupaten Cirebon | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | |
| | TRS I | 1.482,14 | 0,50 | 0,60 | 741,07 | 889,28 |
| | TRS II | 4.640,09 | 0,50 | 0,60 | 2.320,05 | 2.784,06 |
| | Jumlah | 6.122,23 | | | 3.061,12 | 3.673,34 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | |
| | TRT I | 21,00 | 0,50 | 0,60 | 10,50 | 12,60 |
| | TRT II | 178,90 | 0,50 | 0,60 | 89,45 | 107,34 |
| | TRT III | 139,41 | 0,50 | 0,60 | 69,70 | 83,64 |
| | Jumlah | 339,31 | | | 169,65 | 203,58 |
| 3 | TRM | 980,00 | 0,50 | 0,60 | 490,00 | 588,00 |
| | Total | 7.441,54 | | | 3.720,77 | 4.464,92 |

SASARAN PRODUKSI TEBU RAKYAT MTT. 2015/2016
KABUPATEN CIREBON

| NO | Pabrik Gula / Kategori Tanaman | Luas (Ha) | Produksi | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|-------------|--------|
| | | | Ton. Tebu | | Rendemen (%) | Ton. Hablur | |
| | | | Jumlah | Per Ha | | Jumlah | Per Ha |
| I. PG Sindang Laut | | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | | |
| | TRS I | 449,57 | 34.841,68 | 77,50 | 7,75 | 2.700,23 | 6,01 |
| | TRS II | 1.716,62 | 127.030,10 | 74,00 | 7,45 | 9.463,74 | 5,51 |
| | Jumlah | 2.166,19 | 161.871,78 | 74,73 | 7,51 | 12.163,97 | 5,62 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | | |
| | TRT I | 12,50 | 900,00 | 72,00 | 7,75 | 69,75 | 5,58 |
| | TRT II | 54,90 | 3.678,30 | 67,00 | 7,40 | 272,19 | 4,96 |
| | TRT III | 106,41 | 6.810,05 | 64,00 | 7,35 | 500,54 | 4,70 |
| | Jumlah | 173,81 | 11.388,35 | 65,52 | 7,40 | 842,48 | 4,85 |
| 3 | TRM | | | | | | |
| | Total | 2.340,00 | 173.260,13 | 74,04 | 7,51 | 13.006,45 | 5,56 |
| II. PG Karangsuwung | | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | | |
| | TRS I | 333,00 | 23.310,00 | 70,00 | 7,30 | 1.701,63 | 5,11 |
| | TRS II | 1.557,00 | 98.765,00 | 63,43 | 7,05 | 6.962,93 | 4,47 |
| | Jumlah | 1.890,00 | 122.075,00 | 66,72 | 7,10 | 8.664,56 | 4,58 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | | |
| | TRT I | - | - | - | - | - | - |
| | TRT II | - | - | - | - | - | - |
| | TRT III | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | - | - | - | - | - | - |
| 3 | TRM | 30,00 | 1.800,00 | 60,00 | 7,00 | 126,00 | 4,20 |
| | Total | 1.920,00 | 123.875,00 | 64,52 | 7,10 | 8.790,56 | 4,58 |
| III. PG Tersana Baru | | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | | |
| | TRS I | 699,58 | 54.567,01 | 78,00 | 7,20 | 3.928,82 | 5,62 |
| | TRS II | 1.366,46 | 95.543,16 | 69,92 | 7,05 | 6.735,79 | 4,93 |
| | Jumlah | 2.066,04 | 150.110,17 | 72,66 | 7,10 | 10.664,61 | 5,16 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | | |
| | TRT I | 8,50 | 510,00 | 60,00 | 6,85 | 34,94 | 4,11 |
| | TRT II | 124,00 | 8.060,00 | 65,00 | 6,75 | 544,05 | 4,39 |
| | TRT III | 33,00 | 2.079,00 | 63,00 | 6,75 | 140,33 | 4,25 |
| | Jumlah | 165,50 | 10.649,00 | 64,34 | 6,75 | 719,32 | 4,35 |
| 3 | TRM | 950,00 | 75.000,00 | 78,95 | 6,85 | 5.137,50 | 5,41 |
| | Total | 3.181,54 | 235.759,17 | 74,10 | 7,01 | 16.521,43 | 5,19 |
| IV. Kabupaten Cirebon | | | | | | | |
| 1 | TRS (Sawah) | | | | | | |
| | TRS I | 1.482,15 | 112.718,69 | 76,05 | 7,39 | 8.330,68 | 5,62 |
| | TRS II | 4.590,09 | 321.338,26 | 70,01 | 7,21 | 23.162,46 | 5,05 |
| | Jumlah | 6.072,23 | 434.056,95 | 71,48 | 7,26 | 31.493,14 | 5,19 |
| 2 | TRT (Tegalan) | | | | | | |
| | TRT I | 21,00 | 1.410,00 | 67,14 | 7,42 | 104,69 | 4,99 |
| | TRT II | 178,90 | 11.738,30 | 65,61 | 6,95 | 816,24 | 4,56 |
| | TRT III | 139,41 | 8.889,05 | 63,76 | 7,21 | 640,87 | 4,60 |
| | Jumlah | 339,31 | 22.037,35 | 64,95 | 7,09 | 1.561,80 | 4,60 |
| 3 | TRM | 1.030,00 | 76.800,00 | 74,56 | 6,85 | 5.263,50 | 5,11 |
| | Total | 7.441,54 | 532.894,30 | 71,61 | 7,19 | 38.318,44 | 5,15 |